



**PENGARUH AKUNTABILITAS PENGELOLAAN DANA DESA PADA  
MASA PANDEMI *COVID-19* DALAM *THEORY OF PLANNED  
BEHAVIOR***

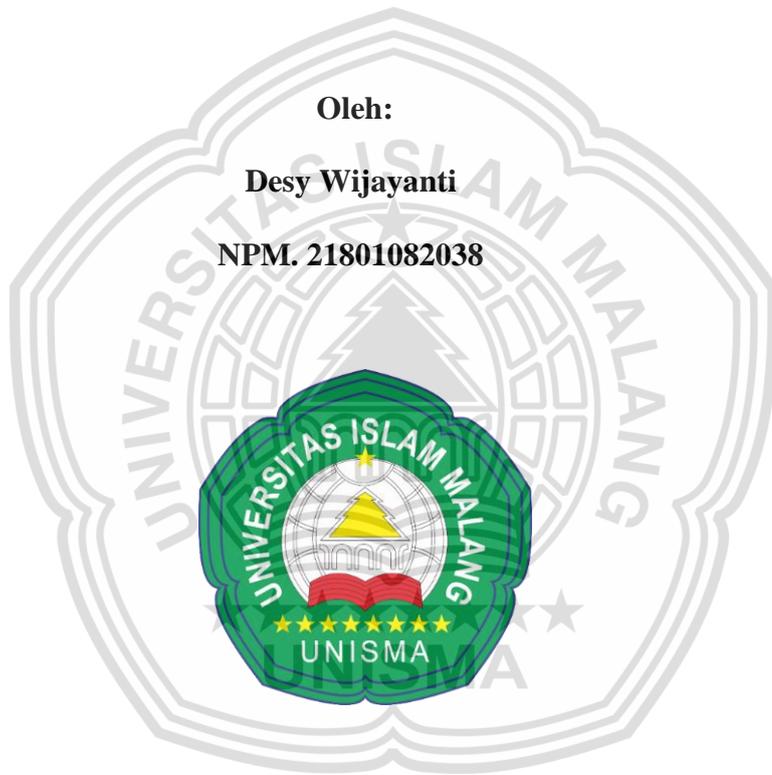
**Skripsi**

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat  
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Akuntansi

Oleh:

**Desy Wijayanti**

**NPM. 21801082038**



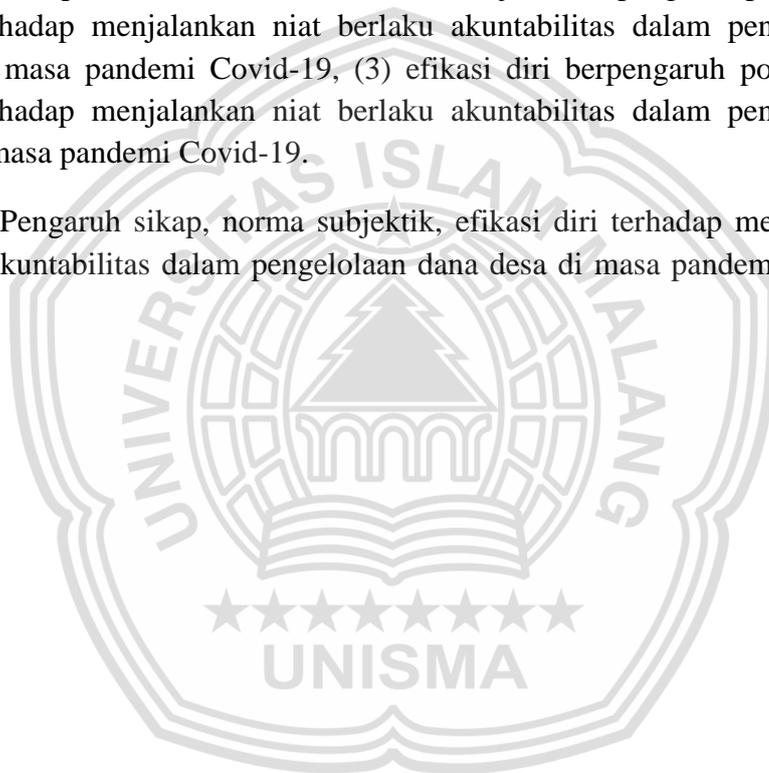
**UNIVERSITAS ISLAM MALANG  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
MALANG**

**2023**

## ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui akuntabilitas pengelolaan dana desa pada masa pandemi *covid-19* dengan menggunakan *theory of planned behavior*. Populasi dalam penelitian ini adalah pejabat Desa Tlekung, Desa Mojorejo, dan Desa Torongrejo. Sedangkan sampel dalam penelitian ini menggunakan teknik Non Probability Sampling. Sampel penelitian ini sebanyak 166 responden. Analisis data dilakukan dengan menggunakan metode regresi linier berganda. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa (1) sikap pengelolaan berpengaruh positif dan signifikan terhadap menjalankan niat berlaku akuntabilitas dalam pengelolaan dana desa di masa pandemi Covid-19, (2) norma subjektif berpengaruh positif dan signifikan terhadap menjalankan niat berlaku akuntabilitas dalam pengelolaan dana desa di masa pandemi Covid-19, (3) efikasi diri berpengaruh positif dan signifikan terhadap menjalankan niat berlaku akuntabilitas dalam pengelolaan dana desa di masa pandemi Covid-19.

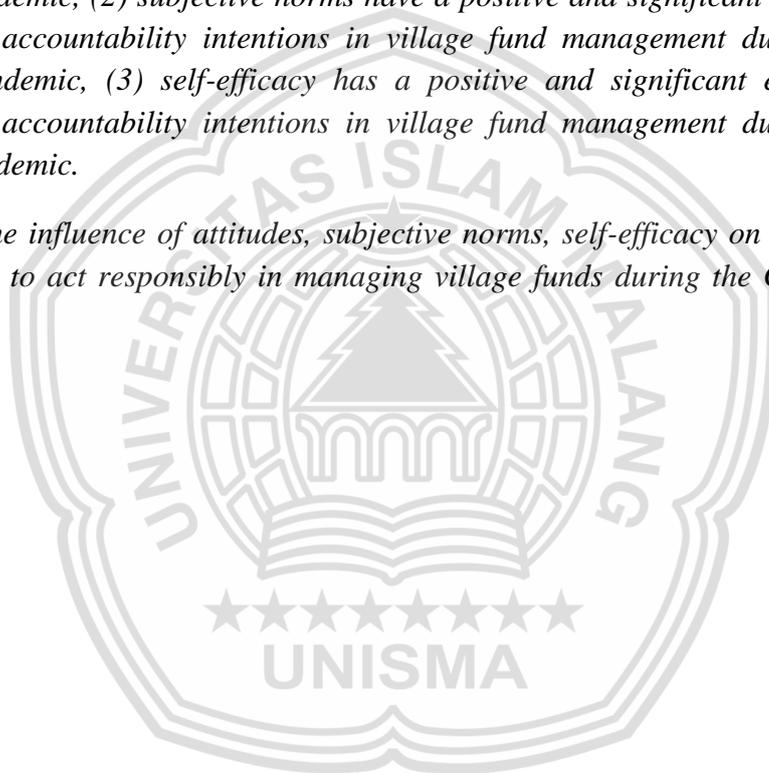
**Kata kunci:** Pengaruh sikap, norma subjektif, efikasi diri terhadap menjalankan niat berlaku akuntabilitas dalam pengelolaan dana desa di masa pandemi Covid-19.



## ABSTRACT

*This study aims to determine the accountability of village fund management during the COVID-19 pandemic using the theory of planned behavior. The population in this study is officials of Tlekung Village, Mojorejo Village, and Torongrejo Village. The sample samples in this study used the Non Probability Sampling technique. The sample of this study was 166 respondents. Data analysis was performed using multiple linear regression method. The results of this study show that (1) management attitudes have a positive and significant effect on carrying out accountability intentions in village fund management during the Covid-19 pandemic, (2) subjective norms have a positive and significant effect on carrying out accountability intentions in village fund management during the Covid-19 pandemic, (3) self-efficacy has a positive and significant effect on carrying out accountability intentions in village fund management during the Covid-19 pandemic.*

**Keywords:** *The influence of attitudes, subjective norms, self-efficacy on carrying out intentions to act responsibly in managing village funds during the Covid-19 pandemic.*



## BAB I PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang Masalah

Tatapan kehidupan masyarakat banyak mengalami perubahan akibat pandemi *covid-19*. Hampir segala aspek terkena dampak dari pandemi, mulai dari ekonomi, pembangunan, politik, dan sebagainya. Semenjak adanya pandemi, masyarakat merasakan bahwa kesejahteraan mereka menurun. Banyak masyarakat yang tiba-tiba kehilangan pekerjaan atau mata pencahariannya semenjak masa pandemi. Corona virus (*Covid-19*) menjadi pandemi di seluruh dunia termasuk di Indonesia, memaksa perubahan arah kebijakan dan perubahan postur pada anggaran. Disahkannya Perpu No.1/2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Menangani Pandemi Corona virus Disease 2019 (*COVID-19*) dan dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan Stabilitas Sistem Keuangan menjadi UU No.2/2020 agar mengakomodir perubahan besar dalam penggunaan anggaran tersebut. Hal ini perlu dilakukan mengingat ancaman *Covid-19* berimplikasi pada aspek sosial, ekonomi, dan kesejahteraan masyarakat. Aturan ini membuat pengelola atau pengguna anggaran dapat menyesuaikan belanja untuk mempercepat penanganan *Covid-19* di masyarakat.

Perubahan postur anggaran tidak hanya terjadi pada APBN dan APBD tetapi juga pada APBDes, Limba dkk, (2020). Perangkat desa sebagai bagian dari pemerintah yang bersentuhan langsung dengan masyarakat bawah pun harus menyesuaikan diri dengan perubahan pada postur APBDes. Selain UU No. 2/2020

tersebut, penggunaan APBDes juga diatur melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No.40/PMK.07/2020 untuk menggantikan PMK No.205/PMK.07/2019 yang sebelumnya sebagai pedoman dalam pengelolaan dana desa. Anggaran difokuskan pada pengeluaran-pengeluaran yang bersifat urgent untuk mencegah penyebaran dan penanganan *Covid-19*, sehingga merubah struktur belanja yang telah dianggarkan sebelumnya. Dalam pelaksanaannya terdapat banyak temuan yang mengarah pada ketidaktepatan sasaran dalam pemberian bantuan tersebut. Banyak masyarakat yang mengeluhkan karena merasa pembagian bantuan tersebut tidak adil dan tidak merata.

Pemerintah mengalokasikan dana desa dalam Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (APBN) yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD) kabupaten atau kota untuk pembangunan desa, yaitu dalam bentuk Alokasi Dana Desa (ADD). Dalam Undang-Undang tersebut menjelaskan bahwa desa akan mendapatkan kucuran dana sebesar paling sedikit 10% dari dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota dalam APBD setelah dikurangi alokasi dana khusus.

Asas Pengelolaan Keuangan Desa Pasal 2 ayat 1 Permendagri Nomor 113 tahun 2014 ini mengatakan bahwa keuangan desa dikelola berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran. Hal ini menunjukkan bahwa keuangan desa harus dikelola secara terbuka, dapat dipertanggungjawabkan serta sesuai dengan peraturan yang ada. Penerapan asas-asas tersebut digunakan untuk mengantisipasi terjadinya kecurangan dalam proses pengelolaan keuangan desa. Penyelenggaraan pemerintahan desa yang baik (*good governance*) terkait pengelolaan ADD

(Akuntabilitas Dana Desa) memerlukan sistem akuntabilitas dan transparansi, sehingga masyarakat dapat mengetahui secara jelas mengenai perencanaan, pelaksanaan, pertanggungjawaban, penatausahaan, dan pelaporan ADD (Akuntabilitas Dana Desa).

Dalam pengelolaan dana desa dituntut adanya suatu aspek tata pemerintahan yang baik (*good governance*) dimana salah satu pilarnya adalah akuntabilitas, menurut Undang-Undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa, dalam penjelasan pasal 24 huruf g, “Akuntabilitas adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir kegiatan penyelenggaraan pemerintah desa harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat desa sesuai dengan ketentuan perundang-undangan”.

Dalam melaksanakan komponen pengelolaan keuangan desa harus didasari pada prinsip akuntabilitas, hal ini menarik untuk diteliti karena jika tidak terpenuhinya prinsip akuntabilitas atau pertanggungjawaban akan menimbulkan implikasi yang luas di lingkup desa seperti : penyelewengan pengelolaan dana desa dan terkendalanya penyaluran dana desa periode selanjutnya. Alokasi dana yang cukup besar diharapkan dapat memberikan dampak yang signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat desa, dan benar-benar dapat dilaporkan serta dipertanggungjawabkan dengan baik, diketahui bahwa kendala dalam proses perencanaan desa yang tidak tepat waktu, keterlambatan pencairan dana dari pemerintah daerah ke desa, keterlambatan dan pembinaan serta pengawasan dari pemerintah daerah yang kurang maksimal, pelaporan kepada bupati, laporan pertanggungjawaban belum terpublikasi kepada masyarakat, Dana desa yang

dimiliki pemerintah desa seharusnya dimanfaatkan seoptimal mungkin sesuai dengan ketentuan perundangan dan tepat sasaran. Pengelolaan keuangan desa yang baik merupakan perwujudan tata kelola pemerintah desa yang akuntabel dan transparan sehingga masyarakat dapat memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, Fauzani, Purwati, & Sudjono, (2018).

Tata kelola dana desa menjadi permasalahan yang serius dan menjadi perhatian masyarakat terutama berhubungan dengan efisiensi dan efektivitasnya. Pengelolaan dana desa yang jauh dari akuntabel dan transparan membuka peluang pengelola untuk melakukan manipulasi, Munti & Fahlevi, (2017).

Kompetensi kepala desa dan aparat desa dalam mengelola dana desa sangat penting karena dapat mengurangi resiko kesalahan baik bersifat administratif maupun substantif. Kompetensi aparat desa sangat dibutuhkan terutama dalam hal tata kelola dan pertanggungjawaban keuangan desa. Resiko yang terjadi dalam pengelolaan dana desa juga dapat terjadi karena lemahnya sistem pengendalian internal dalam penyelenggaraan pemerintahan yang mengakibatkan pemborosan anggaran dan keuangan, Widiyarta dkk, (2018).

Oleh sebab itu, dana desa yang jumlahnya cukup besar tersebut, menuntut pemerintah desa agar dapat mengelola dana desa tersebut sesuai dengan Peraturan Menteri dalam Negeri 113 tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan desa, serta dapat mempertanggungjawabkan penggunaan dana desa secara akuntabel. Untuk dapat mengelola dan mempertanggungjawabkan dana desa yang diterima oleh pemerintah desa dengan baik, pemerintah desa diharapkan mampu menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMD) dan Rencana Anggaran Biaya (RAB) dengan baik, agar dana yang sudah diperoleh dapat sungguh-

sungguh digunakan dengan baik sesuai rencana, serta segala kebijakan yang dibuat dapat dipertanggungjawabkan secara akuntabel.

Alasan mengapa peneliti mengambil judul ini karena peneliti melihat adanya perubahan pada postur anggaran selain itu dimasa pandemi *Covid-19* banyaknya oknum yang menyalahgunakan dana *Covid-19* dan kesulitan dalam pelaksanaan di lapangan yang menjadikan akuntabilitas pengelolaan anggaran dimana pandemi ini menjadi sorotan banyak pihak seperti masyarakat, KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi), Badan Pemerintahan yang ingin melihat secara transparan tentang pengelolaan dana desa. Oleh karena itu, akuntabilitas pengelolaan dana desa di masa pandemi menjadikan hal menarik untuk diteliti. Penelitian-penelitian terkait akuntabilitas dalam pengelolaan dana desa telah banyak dilakukan diantaranya; Aziiz dan Prasiti, (2019); Imawan dkk, (2019); Martini dkk, (2019); Babulu, (2020) dan penelitian lainnya yang sejenis, Penelitian-penelitian tersebut menjelaskan akuntabilitas, dana desa dari sudut pandang organisasi. Selain itu, akuntabilitas dapat juga dijelaskan dengan sudut pandang teori pelaku, hal ini dikarenakan prinsip akuntabilitas sebagai alat yang digunakan untuk mengawasi dan mengarahkan perilaku administrasi dengan cara memberikan kewajiban untuk dapat memberikan pertanggungjawaban kepada pihak otoritas eksternal Koppel, (2005:96). Penelitian ini menggunakan model *Theory of Planned Behavior* (TPB) untuk melihat akuntabilitas sebagai perilaku pengelola dana desa.

Model TPB (*Theory of Planned Behavior*) yang dikemukakan oleh Ajzen, (2005), mendalilkan bahwa niat (*intention*) seseorang adalah penentuan utama untuk melakukan perilaku (*behavior*). Niat tersebut dipengaruhi oleh tiga faktor

yaitu sikap terhadap perilaku (*attitude towards behavior*) yang menunjukkan evaluasi yang positif atau negatif terhadap objek tertentu: norma subjektif (*subjective norm*) yang menunjukkan persepsi terhadap tekanan sosial untuk melakukan perilaku tertentu, serta kontrol perilaku (*perceived behavior control*) yang menunjukkan kemudahan atau kesulitan untuk melakukan perilaku tertentu. Hal ini berarti bahwa, niat pengelola dana desa untuk berlaku akuntabel atau memenuhi prinsip akuntabilitas dipengaruhi oleh evaluasi diri pengelola dana desa terhadap prinsip akuntabilitas, kemudian, adanya pengaruh orang-orang disekitar atau tekanan sosial terhadap pengelola dana desa, serta kemudahan atau kesulitan yang dimiliki oleh pengelola dana desa untuk menjalankan prinsip akuntabilitas.

Penelitian ini menangkap research dengan perbedaan pada objek dan menggunakan TPB (*Theory Of Planned Behavior*) untuk menjelaskan akuntabilitas pengelolaan dana desa, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **PENGARUH AKUNTABILITAS PENGELOLAAN DANA DESA PADA MASA PANDEMI COVID-19 DALAM THEORY OF PLANNED BEHAVIOR**

## 1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dirumuskan di atas, maka dalam penelitian ini dirumuskan masalah :

1. Bagaimana sikap pengelolaan berpengaruh terhadap menjalankan niat berperilaku akuntabilitas pada masa Pandemi?
2. Bagaimana norma subjektif berpengaruh terhadap menjalankan niat berperilaku akuntabilitas pada masa Pandemi?

3. Bagaimana efikasi diri berpengaruh terhadap menjalankan niat berperilaku akuntabilitas pada masa Pandemi?

### **1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian**

#### **1.3.1 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah, maka dapat dikemukakan tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini yaitu :

1. Untuk mengetahui pengaruh sikap terhadap menjalankan niat berlaku akuntabilitas pada masa Pandemi.
2. Untuk mengetahui pengaruh norma subyektif terhadap menjalankan niat berlaku akuntabilitas pada masa Pandemi.
3. Untuk mengetahui pengaruh efikasi diri terhadap menjalankan niat berlaku akuntabilitas pada masa Pandemi.

#### **1.3.2 Manfaat Penelitian**

##### **1. Manfaat Teoritis**

Penelitian ini bisa menjadi acuan atau referensi bagi penelitian selanjutnya, sehingga dapat mengembangkan dan menambahkan bidang ilmu akuntansi yang berkaitan dengan keuangan desa.

##### **2. Manfaat Praktis**

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan masukan kepada pihak-pihak berikut:

- a) Bagi peneliti dan akademis

Menjadi bahan ajar metode penelitian dalam Mata kuliah akuntansi keuangan dimana laporan keuangan ini sesuai

dengan SAK yang sudah ditetapkan. Memberikan pengetahuan mengenai akuntabilitas pengelolaan dana desa.

b) Bagi pemerintah desa

Sebagai sarana terhadap kemungkinan terjadinya dalam praktik penyalahgunaan dalam Akuntabilitas Dana Desa. Mengetahui cara kerja Akuntabilitas pada dana desa.



## BAB V

### SIMPULAN DAN SARAN

#### 5.1 Simpulan

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui mengenai pengaruh antara sikap pengelolaan, norma subjektif, dan efikasi diri terhadap niat berlaku akuntabilitas yang dilakukan di 3 desa antara lain Desa Tlekung, Desa Mojorejo, dan Desa Torongrejo. Dari hasil penelitian yang telah dijelaskan secara lebih rinci pada bab sebelumnya, maka kesimpulan yang dapat diambil adalah sebagai berikut:

1. Sikap pengelolaan, norma subjektif, dan efikasi diri secara bersama-sama atau simultan berpengaruh terhadap menjalankan niat berlaku akuntabilitas dalam pengelolaan dana desa di masa pandemi *Covid-19*.
2. Secara parsial, sikap pengelolaan berpengaruh positif dan signifikan terhadap menjalankan niat berlaku akuntabilitas dalam pengelolaan dana desa di masa pandemi *Covid-19*.
3. Secara parsial, norma subjektif berpengaruh positif dan signifikan terhadap menjalankan niat berlaku akuntabilitas dalam pengelolaan dana desa di masa pandemi *Covid-19*.
4. Secara parsial, efikasi diri berpengaruh positif dan signifikan terhadap menjalankan niat berlaku akuntabilitas dalam pengelolaan dana desa di masa pandemi *Covid-19*.

## 5.2 Keterbatasan

1. Distribusi kuesioner sepenuhnya dilakukan dengan menggunakan media *chat* pribadi dan melalui *broadcast* pesan tautan kuesioner melalui grup obrolan milik sampel sehingga cukup terbatas dalam memastikan bahwa calon responden benar-benar sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan.
2. Dalam penelitian ini menggunakan dimensi niat berlaku akuntabilitas sebagai variabel independen untuk meneliti pelaporan dana desa pada masa *pandemic covid-19*, meliputi variabel sikap pengelolaan, norma subjektif, dan efikasi diri.
3. Objek penelitian ini meneliti 3 desa.

## 5.3 Saran

1. Bagi peneliti selanjutnya diharapkan menggunakan metode penelitian dengan metode menyebar kuesioner secara langsung dan wawancara secara langsung.
2. Peneliti selanjutnya diharapkan menggunakan variabel lainnya misalnya menggunakan persepsi perangkat desa, transparansi, dan kompetensi sebagai faktor pengukur lain untuk mengukur akuntabilitas pengelolaan dana desa pada masa pandemi *Covid-19*.
3. Untuk mendapat objek yang lebih tinggi maka penelitian bisa diperluas dengan melakukan penelitian di Malang Raya dan se provinsi Jawa Timur.

## DAFTAR PUSTAKA

- Andri Widiyanto, Dan Hanna Khoirunnisa, 2021. “Analisis Pengelolaan Dana Desa Melalui Pendekatan Teori Perilaku Terencana (*Theory Of Planned Behavior* Pada Masa Pandemi *Covid-19*)”.
- Ajzen, Icek. 2005. *Attitudes, Personality, And Behavior*. Milton Keynes: *Open University Press Dan Chicago, Il: Dorsey Press*.
- Arikunto, 2012, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: PT Rineka Cipta.
- Baron, R. A & Byne, Donn 2008. *Psikologi sosial*. Jilid 1 Jakarta: Penerbit Erlangga.
- Cantika dan Suci 2021 “*Theory Of Planned Behavior* Dalam Memprediksi Niat Polisi Menggunakan SPK *Online* Pada Polsek Seririt Kabupaten Buleleng”.
- Clearly, S., & Malleret, T. 2008. *Berbisnis Dengan Osama* (1st ed.). Serambi Ilmu Semesta.
- Ledvina V. Carino, 2002, *Administrative Accountability*, San Francisco State University Fall.
- Feist, J. & Gregory J. Feist. 2011. *Theories Of Personality* (Edisi Keenam). Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Franco Benony Limba, Sapulette, Dan Usmany, 2020. “Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Pada Masa Pandemi *Covid-19* Dalam *Theory Of Planned Behavior*”. Vol.9 No.2.
- Fauzani, F. M., Purwati, A. S., & Sudjono. 2018. Analisis Persepsi Pengaruh Penyajian Laporan Pertanggungjawaban Dan Aksesibilitas Terhadap Transparansi Dan Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Di Desa Cipaku Kecamatan Mrebet Kabupaten Purbalingga. Seminar Nasional dan *Call for Paper Sustainable Competitive Advantage (SCA)* 8.
- Fishbein, Martin & Icek Ajzen, 2019. *Belief, attitude, intention and behavior an introduction to theory and research*. London: Addison-Wesley
- Ghozali, Imam, 2015. *Konsep, Teknik, Aplikasi Menggunakan Smart Pls Untuk Penelitian Empiris*. Yogyakarta: Bpfe.
- Gujarati, D.N., 2012, *Dasar-dasar Ekonometrika*, Terjemahan Mengsong, R.C., Salemba Empat, buku 2, Edisi 5, Jakarta.
- Ghartey, J.B. 2008, *Decentralisation Transparency Social Capital and Development*, Massachusetts.

- Ikhwan Wadi, 2019. “Pengaruh Norma Subjektif Dan *Prosocial Behavior* Terhadap Transparansi Dan Akuntabilitas”. E-Journal Akuntansi Vol.30 No.1.
- Imelda, S., Rofi’i, Hikmayanti. 2014. Pengaruh Sikap Dan Norma Subjektif Terhadap Minat Konsumen ( Studi Pada Pengguna Refill Tinta Printer Dataprint di Banjarmasin). *Sindy and Management Research*.
- Jogiyanto, H.M, 2007. *Sistem Informasi Keperilakuan*. Semarang: Penerbit ANDI Yogyakarta.
- Koppel, J. Gs. 2005, *Pathologies Of Accountability : Icann And The Challenge Of Multiple Accountabilities Disorder, Public Administration Review*, Vol.65 No.1.
- Monika Landra. 2019. Analisis Lingkungan Strategis Pencegahan Penyebaran COVID-19 Di Rutan Kelas IIB Kudus. *Jurnal Ilmiah Hukum* Vol. 18 No.2.
- Muhdiyanto., & Hidayati, L. A. 2013. Efek Moderasi *Self-Efficacy* Pada Pengaruh Kecerdasan Emosional Terhadap Perilaku Kewargaan Organisasional.
- Munti, F., & Fahlevi, H. 2017. Determinan kinerja pengelolaan keuangan desa: Studi pada Kecamatan Gandapura Kabupaten Bireuen Aceh. *Jurnal Akuntansi dan Investasi*, 18(2), 172-182.
- Mulyatiningsih Rudi dkk, 2004. *Bimbingan Pribadi, sosial, belajar, dan karir*. Jakarta: PT Gramedia Widiasarana Indonesia.
- Natalia Lili Babulu, 2020. “ Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Akuntabilitas Dalam Pengelolaan Dana Desa Dan Dampaknya Terhadap Pencegahan Fraud” *Jurnal Ekonomi Pembangunan* Vol.2 No.2.
- Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Tentang Kebijakan Keuangan Negara Dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi *Corona virus Disease 2019 (Covid-19)* Dan/Atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional Dan/Atau Stabilitas Sistem Keuangan.
- Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 40 /Pmk.07/ 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/ Pmk.07/ 2019 Tentang Pengelolaan Dana Desa
- Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 14 Tahun 2014 Tentang Dana Desa Yang Bersangkutan Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara.
- Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dalam Implementasinya belum menjamin pengalokasian Dana Desa secara lebih merata dan berkeadilan sesuai dengan Kemampuan Keuangan Negara.

- Peraturan Kementerian Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Peraturan Kementerian Dalam Negeri Dan Pengelolaan Keuangan Desa.
- Robbins, 2007. *Perilaku Organisasi*. Jakarta: Salemba Empat.
- Septarina Prida, Siti Wardayat, Dan Ananda Firly, 2020. “*Profiling Selebriti Fraud: Analisis Profil Koruptor Di Indonesia*”. *Jurnal Akuntansi Dan Pajak* Vol 20 No.02.
- Sifa Farida, 2019. “Peran Pembelajaran Kewirausahaan Dalam Memoderasi Pengaruh Sikap. Norma Subjektif Dan *Self Efficacy* Terhadap Minat Berwirausaha”.
- Sugiyono. 2017. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*. Bandung : Alfabeta, Cv.
- Sugiyono. 2014. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta
- Sjahrudin Rasul, 2000. *Pengintegrasian Sistem Akuntabilitas Kinerja*, Jakarta.
- Sarwono. 2000. *Teori-teori Psikologi Sosial*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Saleh, Sirajudin H dan Iqbal, Islam ,Aslam . 2008. *Konsep dan arti Akuntabilitas*. [Dppka.jogjaprovo.go.id/document/artiakuntabilitas.doc](http://Dppka.jogjaprovo.go.id/document/artiakuntabilitas.doc).
- Santoso, S. 2010. *Mastering SPSS 18*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo.
- Thomas Sumarsan. 2013. *Sistem Pengendalian Manajemen, Edisi 2*, Pt Indeks, Jakarta.
- Undang-Undang No.6 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Desa.
- Undang-Undang No 2 Tahun 2020 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi *Corona virus Disease 2019 (Covid-19)* dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang.
- Vinny Alvionita Lubis, Siti Rapingah, 2016. “*Determinan Yang Berhubungan Dengan Perilaku Pemberian Makan Ibu Pada Anak Usia Prasekolah Menggunakan Theory Of planned Behavior*’.
- V. Wiratna Sujarweni, 2015. *Akuntansi Biaya*. Yogyakarta: Pustaka Baru Press.
- Widiyarta, K., Herawati, N. T., & Atmadja, A. T. (2018). Pengaruh kompetensi aparatur, budaya organisasi, whistleblowing dan sistem pengendalian internal terhadap pencegahan fraud dalam pengelolaan dana desa (Studi empiris pada Pemerintah Desa Di Kabupaten Buleleng). *JIMAT (Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi) Undiksha*, 8(2).

Wedayanti, N.P.A.A., & Giantari, I.G.A.K. 2016. Peran Pendidikan Kewirausahaan dalam Memediasi Pengaruh Norma Subyektif Terhadap Niat Berwirausaha. *E-Jurnal Manajemen Unud, Vol. 05. No. 01, 2016: 533-560.*

Yadiati, Winwin dan Ilham Wahyudin 2006. Pengantar Akuntansi. Penerbit Prenada. Media Group, Jakarta.

